

## **PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN PENGEMBANGAN KOPERASI DI KOTA SUKABUMI**

**Agus Sobar**  
**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Sukabumi**  
agus.sobar@stiepgri.ac.id

### **Abstrak**

Terwujudnya masyarakat yang sejahtera adalah merupakan tujuan dari bernegara. Peran Negara/ Pemerintah menjadi sangat vital dan integral dalam mewujudkan cita-cita tersebut, karena pemerintah bertindak sebagai fasilitator dan sekaligus juga sebagai regulator. Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota memiliki tanggungjawab untuk menggerakkan seluruh komponen dunia usaha, yang terdiri dari BUMN, BUMS, dan Badan Usaha Koperasi. Koperasi sebagai badan usaha yang dianggap sesuai dengan kepribadian bangsa sampai saat memiliki peran yang relative kecil bila dibandingkan dengan kedua badan usaha lainnya. Kondisi yang demikian memberikan konsekuensi Pemerintah untuk lebih memperhatikan pembinaan pengembangan koperasi. Pemerintah Kota sukabumi dalam setaip tahunnya memiliki kebijakan pembinaan pengembangan koperasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan ; fasilitasi promosi pengembangan produk, fasilitasi pengembangan jaringan usaha, fasilitasi pengembangan permodalan, fasilitasi penerapan teknologi, dan pendidikan pelatihan SDM Koperasi yang didukung anggaran yang setiap tahunnya mengalami kenaikan. Peranan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam pengembangan koperasi mampu mendukung perkembangan koperasi lebih baik, aktif dan prospektif.

Kata Kunci : fasilitas pengembangan koperasi, anggaran, koperasi aktif.

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Salah satu tujuan Negara Indfonesia sebagaimana tersurat dalam pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) Negara tahun 1945 adalah berbunyi sebagaiberikut : “..... memajukan kesejahteraan umum”. Untuk mewujudkan tujuan tersebut pemerintah / Negara melaksanakan pembangunan disegala bidang. Dari sekian banyak bidang pembangunan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan di Indonesia adalah pembangunan bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan pembangunan yang sangat vital dan integral

dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara merata baik material maupun spiritual.

Peran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia sangat sentral mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah kabupaten/ kota. Sedangkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan khususnya pembangunan ekonomi melibatkan segenap pelaku ekonomi. Tiga pihak pelaku ekonomi yang dikenal sesuai dengan yang termaktub dalam penjelasan UUD 1945 meliputi ; Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta

(BUMS), dan Badan Usaha Koperasi. Masing-masing badan usaha pelaku ekonomi tersebut menguasai bidang usaha yang telah diatur sedemikian rupa sehingga tercipta keselarasan peran dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang berkeadilan.

Sebagaimana dijelaskan di atas pemerintah/negara memiliki peranan yang sangat menentukan dalam pembagian ekonomi dalam rangka terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut pemerintah/ Negara berupaya mendorong para pelaku ekonomi agar berperanserta secara aktif. Salah satu pilar perekonomian nasional Indonesia adalah gerakan koperasi.

Sebagai bentuk tanggungjawab dari pemerintah/ negara dalam memberdayakan badan usaha koperasi pemerintah/ negara membentuk sebuah kelembagaan setingkat kementerian yang dikhususkan menangani perkoperasian di Indonesia. Kementerian koperasi yang berada di tingkat pusat, dalam upayanya menjangkau layanan pengembangan gerakan koperasi sampai dengan seluruh pelosok negeri selanjutnya membentuk dinas yang melayani gerakan koperasi baik di tingkat propinsi sampai dengan tingkat kabupaten/ kota. Adapun dinas yang menangani koperasi di tingkat propinsi ataupun kabupaten/kota ada yang berdiri

sendiri ataupun digabung dengan dinas-dinas lainnya.

Di Kota sukabumi dinas yang ditugaskan untuk menangani pelayanan pengembangan gerakan koperasi tergabung dengan beberapa urusan dinas lainnya dengan nama “Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian atau disingkat dengan Dinas Kopdagrin”. Dinas Kopdagrin Kota Sukabumi adalah merupakan instansi di bawah Pemerintah daerah Kota Sukabumi yang diberikan wewenang dan tanggungjawab diantaranya adalah memfasilitasi, mengembangkan, dan mengawasi gerakan koperasi yang ada di Kota Sukabumi.

Mengingat pentingnya kedudukan gerakan koperasi dalam perekonomian nasional, khususnya dalam pembangunan ekonomi di kota Sukabumi, maka penelitian ini mengambil judul “Peranan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan gerakan Koperasi di Kota Sukabumi.

### **Identifikasi Masalah**

Untuk mempermudah bahasan masalah dalam penelitian ini, maka dilakukan pengidentifikasian masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan pembinaan pengembangan koperasi di Kota Sukabumi

2. Berapa jumlah anggaran pembinaan pengembangan koperasi di Kota Sukabumi
3. Bagaimana perkembangan koperasi di kota Sukabumi
4. Bagaimana peranan Pemerintah daerah dalam pembinaan pengembangan koperasi di Kota Sukabumi

### **Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Umum  
Mempelajari masalah kebijakan Pemerintah Daerah kota Sukabumi dalam pembinaan pengembangan koperasi untuk dijadikan bahan evaluasi penentuan kebijakan dimasa yang akan datang.
2. Tujuan Khusus
  - 1) Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan Pememerintah dalam pembinaan pengembangan koperasi di Kota Sukabumi
  - 2) Untuk mengetahui jumlah anggaran pembinaan pengembangan koperasi di Kota Sukabumi
  - 3) Untuk mengetahui perkembangan koperasi di kota Sukabumi
  - 4) Untuk mengetahui peranan Pemerintah Daerah dalam pembinaan pengembangan koperasi di Kota Sukabumi

### **KAJIAN PUSTAKA**

Badan usaha koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi di Indonesia adalah merupakan lembaga perekonomian yang benar-benar sesuai dengan watak dan cita-cita pembagunan ekonomi Nasional Indonesia. Hal ini sesuai dengan penjelasan UUD 1945, pasal 33 yang menyatakan bahwa “..... perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Bangun yang sesuai dengan itu adalah koperasi”. Berdasarkan Undang Undang Nomor 25, tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, dinyatakan bahwa, “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan”.

Koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat diharapkan menjadi lembaga ekonomi yang berperan nyata dalam meningkatkan tarap hidup dan tingkat kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan fungsi dan peran koperasi (UU Nomor 25, 1992), yaitu :

1. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya

2. Berperanserta secara aktif dalam mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dari pernyataan di atas fungsi dan peran koperasi di Indonesia diharapkan mampu menjadi salah satu solusi yang diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera adil dan makmur. Peran pemerintah, yang mencakup pemerintah pusat sampai dengan pemerintah kabupaten/kota menjadi sangat strategis. Peran Pemerintah Daerah Kota Sukabumi untuk mengefektifkan kebijakan pemerintah pusat dalam pengembangan perkoperasian menjadi sangat penting untuk diteliti dan dievaluasi.

### Uji Analisis Data

Untuk melihat bagaimana peranan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam pengembangan koperasi di Kota Sukabumi, maka digunakan methoda yang sederhana yaitu dengan

mempergunakan fungsi matematika. Pemilihan methoda analisis data fungsi matematika dipergunakan dikarenakan karakteristik data yang beragam. Adapun analisis fungsi matematika yang dipergunakan adalah sebagaiberikut :

$$Y = f(X)$$

Dimana:

Y = perkembangan koperasi

X = pembinaan pengembangan koperasi

Dengan hasil analisis data memiliki pemahaman sebagai berikut:

1. Jika X naik = Y naik
2. Jika X tetap = Y tetap
3. Jika X turun = Y turun

Hasil analisis data memberikan pemahaman:

1. X berperan terhadap Y
  - a. Berperan searah
  - b. Berperan terbalik
2. X tidak berperan terhadap Y

### Pembahasan Masalah

#### Pelaksanaan Pembinaan Pengembangan Koperasi

Pembinaan pengembangan koperasi di Kota Sukabumi dari tahun 2012 sampai 2016 yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian Kota Sukabumi sangat beragam. Adapun bentuk kegiatan pembinaan pengembangan koperasi tersebut adalah sebagaiberikut :

Tabel 1

## Pelaksanaan Pembinaan Pengembangan Koperasi Tahun 2012

| No | Kegiatan                                                   |
|----|------------------------------------------------------------|
| 1  | Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi |
| 2  | Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi                   |
| 3  | Pemantauan pengelolaan dana pemerintah bagi koperasi       |

Sumber : Dinas Kopdagrin Kota Sukabumi

Tabel 2

## Pelaksanaan Pembinaan Pengembangan Koperasi Tahun 2012

| No | Kegiatan                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Fasilitasi pengembangan usaha                                                         |
| 2  | Pelatihan kewirausahaan                                                               |
| 3  | Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan                                  |
| 4  | Pelatihan manajemen pengelolaan kopearsi                                              |
| 5  | Rintisan penerapan teknologi sederhana dan manajemen modern pada jenis usaha koperasi |
| 6  | Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi                           |
| 7  | Pemantauan pengelolaan dana pemerintah bagi koperasi                                  |

Sumber : Dinas Kopdagrin Kota Sukabumi

Tabel 3

## Pelaksanaan Pembinaan Pengembangan Koperasi Tahun 2014

| No | Kegiatan                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Fasilitasi pengembangan usaha                                                         |
| 2  | Pelatihan kewirausahaan                                                               |
| 3  | Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan                                  |
| 4  | Pelatihan manajemen pengelolaan kopearsi                                              |
| 5  | Rintisan penerapan teknologi sederhana dan manajemen modern pada jenis usaha koperasi |
| 6  | Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi                           |
| 7  | Pemantauan pengelolaan dana pemerintah bagi koperasi                                  |

Sumber : Dinas Kopdagrin Kota Sukabumi

Tabel 4

## Pelaksanaan Pembinaan Pengembangan Koperasi Tahun 2015

| No | Kegiatan                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Sosialisasi kebijakan tentang koperasi                                                |
| 2  | Fasilitasi pengembangan usaha                                                         |
| 3  | Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi                                 |
| 4  | Pelatihan manajemen pengelolaan kopearsi                                              |
| 5  | Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan                                  |
| 6  | Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi koperasi                       |
| 7  | Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga                                          |
| 8  | Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi                     |
| 9  | Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian                                   |
| 10 | Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi                            |
| 11 | Rintisan penerapan teknologi sederhana dan manajemen modern pada jenis usaha koperasi |

Sumber : Dinas Kopdagrin Kota Sukabumi

Tabel 5

## Pelaksanaan Pembinaan Pengembangan Koperasi Tahun 2016

| No | Kegiatan                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Fasilitasi pengembangan usaha                                                         |
| 2  | Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan                                  |
| 3  | Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi koperasi                       |
| 4  | Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga                                          |
| 5  | Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi                     |
| 6  | Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi                            |
| 7  | Rintisan penerapan teknologi sederhana dan manajemen modern pada jenis usaha koperasi |

Sumber : Dinas Kopdagrin Kota Sukabumi

Dari penjelasan di atas pembinaan pengembangan koperasi yang dilaksanakan dalam lima tahun terakhir oleh Pemerintah Daerah Kota Sukabumi mengalami perkembangan yang cukup signifikan

kecuali dari tahun 2015 ke tahun 2016, begitu juga dengan jenis kegiatan pembinaannya.

### Besaran Jumlah Anggaran Pembinaan Pengembangan Koperasi di Kota Sukabumi

Besaran jumlah anggaran pembinaan pengembangan koperasi di Kota Sukabumi dalam tahun terakhir dari tahun 2012 sampai 2016 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hal ini bias

difahami karena dalam setiap tahunnya pembinaan dilakukan secara berkelanjutan dengan jenis kegiatan yang bervariasi. Namun demikian dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan, lebih jelasnya jumlah anggaran pembinaan pengembangan koperasi di Kota Sukabumi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6

Jumlah Anggaran Pembinaan Pengembangan Koperasi di Kota Sukabumi

| Tahun | Jumlah Anggaran (Rp) | Perubahan (Rp)   | Prosentase Perubahan |
|-------|----------------------|------------------|----------------------|
| 2012  | 99.200.000,00        | -                | -                    |
| 2013  | 445.180.000,00       | 345.980.000,00   | 348,77 %             |
| 2014  | 503.075.000,00       | 57.895.000,00    | 13,00 %              |
| 2015  | 952.939.000,00       | 449.864.000,00   | 89,42 %              |
| 2016  | 746.090.250,00       | (206.848.750,00) | (21,71 %)            |

Sumber : Dinas Kopdagrin Kota Sukabumi

Jumlah biaya yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Sukabumi untuk pembinaan pengembangan koperasi dalam lima tahun terakhir, dari tahun 2012 sampai 2016 mengalami peningkatan yang signifikan kecuali dari tahun 2015 ke 2016 mengalami penurunan sebesar Rp 206.848.750,00 atau mengalami penurunan sebesar 21,71 %.

### Perkembangan Koperasi di Kota Sukabumi

Untuk membahas perkembangan koperasi di Kota Sukabumi maka terdapat beberapa indikator yang dipergunakan, adapun indikator-indikator itu selengkapnya adalah sebagai berikut :

#### 1) Jumlah Koperasi

Jumlah koperasi di Kota Sukabumi dalam lima tahun, dari tahun 2012 sampai 2016 mengalami kondisi yang fluktuatif, namun secara umum mengalami perkembangan. Adapun data lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7

## Perkembangan Jumlah Badan Usaha Koperasi

| Tahun | Jumlah Koperasi | Perubahan | Prosentase Perubahan |
|-------|-----------------|-----------|----------------------|
| 2012  | 360             | -         | -                    |
| 2013  | 356             | ( 4 )     | ( 1,11 % )           |
| 2014  | 314             | ( 42 )    | ( 11,80 % )          |
| 2015  | 402             | 88        | 28,03 %              |
| 2016  | 412             | 10        | 2,49 %               |

Sumber : Dinas Kopdagrin Kota Sukabumi

## 2) Jumlah Koperasi Aktif

Koperasi aktif adalah koperasi yang menjalankan aktivitas keorganisasian

dan aktivitas usaha. Jumlah koperasi aktif dari tahun 2012 sampai 2016 adalah sebagaiberikut:

Tabel 7

## Jumlah Badan Usaha Koperasi Aktif

| Tahun | Jumlah Koperasi | Perubahan | Prosentase Perubahan |
|-------|-----------------|-----------|----------------------|
| 2012  | 150             | -         | -                    |
| 2013  | 206             | 56        | 37,33 %              |
| 2014  | 215             | 9         | 4,37 %               |
| 2015  | 208             | ( 7 )     | ( 3,26 % )           |
| 2016  | 200             | ( 8 )     | ( 3,85 % )           |

Sumber : Dinas Kopdagrin Kota Sukabumi

## 3) Koperasi yang Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Pelaksanaan RAT pada organisasi usaha seperti koperasi merupakan aktivitas yang harus dilaksanakan, karena pada forum RAT evaluasi terhadap kinerja organisasi dilakukan. Pada forum RAT pula perencanaan

kerja dan RAPB Koperasi disusun dan disyahkan oleh pemiliknya yaitu anggota koperasi. Dengan begitu demikian strategisnya pelaksanaan RAT pada organisasi koperasi. Data berikut adalah data koperasi yang berhasil menyelenggarakan RAT dalam lima tahun terakhir.

Tabel 7

## Jumlah Badan Usaha Koperasi yang Melaksanakan RAT

| Tahun | Jumlah Koperasi | Perubahan | Prosentase Perubahan |
|-------|-----------------|-----------|----------------------|
| 2012  | 87              | -         | -                    |
| 2013  | 54              | ( 33 )    | ( 37,93 % )          |
| 2014  | 91              | 37        | 68,52 %              |
| 2015  | 56              | ( 35 )    | ( 38,46 % )          |
| 2016  | 60              | 4         | 7,14 %               |

Sumber : Dinas Kopdagrin Kota Sukabumi

### Peranan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam Pembinaan dan Pengembangan Koperasi

Peranan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi yang diwujudkan melalui berbagai program pembinaan pengembangan koperasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan ; fasilitasi promosi pengembangan produk, fasilitasi pengembangan jaringan usaha, fasilitasi pengembangan permodalan, fasiltasi penerapan teknologi, dan pendidikan pelatihan SDM Koperasi yang didukung anggaran yang setiap tahunnya mengalami kenaikan. Peranan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam pengembangan koperasi mampu mendukung perkembangan koperasi lebih baik, aktif dan prospektif.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adiwidjaya, Talman, dan Rivai Wirasasmita, (1990), *Neraca koperasi*. Bandung : Pioneer Jaya.
- Arif, Burhan. “Koperasi Masa Lalu dan Masa Kini Serta Prospeknya di Masa yang Akan Datang”, Ikopin Jatinangor Bandung
- Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sukabumi, (2013), Pedoman Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan.
- Kusnadi, Hendar, (2005), *Ekonomi Koperasi*, LP Fakultas Ekonomi Univeritas Indonesia, Jakarta.
- Republik Indfonesia, Undang Undang No 25, Tahun 1992, tentang Pokok-pokok Perkoperasian
- Republik Indonesia, Undang Undang Dasar 1945.